

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- BAPPEDA. *Sejarah Bappeda dan Struktur Organisasi BAPPEDA*. 2019. <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/index-pages> (Diakses November 2022)
- Bawono, I & Novelsyah, M. (2016). *Perpajakan Untuk Bendaharawan Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bohari. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Depok: Rajawali Pers.
- Bramasto & Rachman. (2020). *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jumaiyah & Wahidullah. (2020). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Kemdikbud. *Perubahan Lapisan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Mei 2022. <https://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-2-perubahan-lapisan-pajak-penghasilan-pasal-21> (Diakses Maret 2023)
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Peyetoran dan Pelaporan Pajak, Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- PajakBro. *Tabel PTKP 2021 Terbaru dan Kenaikan Tarif PTKP 5 Tahun*. 2021. <https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html> (Diakses November 2022)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 atau Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun.

Rahayu,P . (2019). *Perpajakan Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidorarjo: Indomedia Pustaka.

Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2018). *Praktikum Perpajakan Informasi Umum, Kasus, dan Formulir-Formulir Edisi 10*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2018). *Praktikum Perpajakan Instruksi & Kertas Kerja Edisi 10*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supramono & Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penangihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 tentang menjadi objek pajak penghasilan.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

